

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2004 mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Konsekuensi dari diberlakukannya undang-undang ini adalah pembangunan kini lebih dititik beratkan pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing dan bukan ditangani secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu setiap daerah harus mengembangkan sektor-sektor unggulan yang menjadi inti kompetisi sesuai dengan potensi sumber daya dan karakteristik daerah yang dimilikinya.

Menurut Azhar (2001), suatu sektor dikatakan unggul jika sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar domestik atau nasional. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan), maka sektor tersebut harus mampu mengeksport produknya ke daerah atau wilayah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor tersebut harus mengimpor produk tersebut dari daerah lain. Sehingga dapat dipahami bahwa suatu sektor basis (unggulan) adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif.

Kontribusi sektor pertanian di negara Indonesia dari tahun ke tahun presentasinya terus menurun searah dengan melajunya perkembangan sektor industri yang terus meningkat (Nurmala, 2012). Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam

sumbangannya terhadap produk domestik bruto, tingkat pertumbuhan sektor pertanian penting artinya dalam kaitannya dengan pertumbuhan sektor perekonomian lainnya (Isbah 2016).

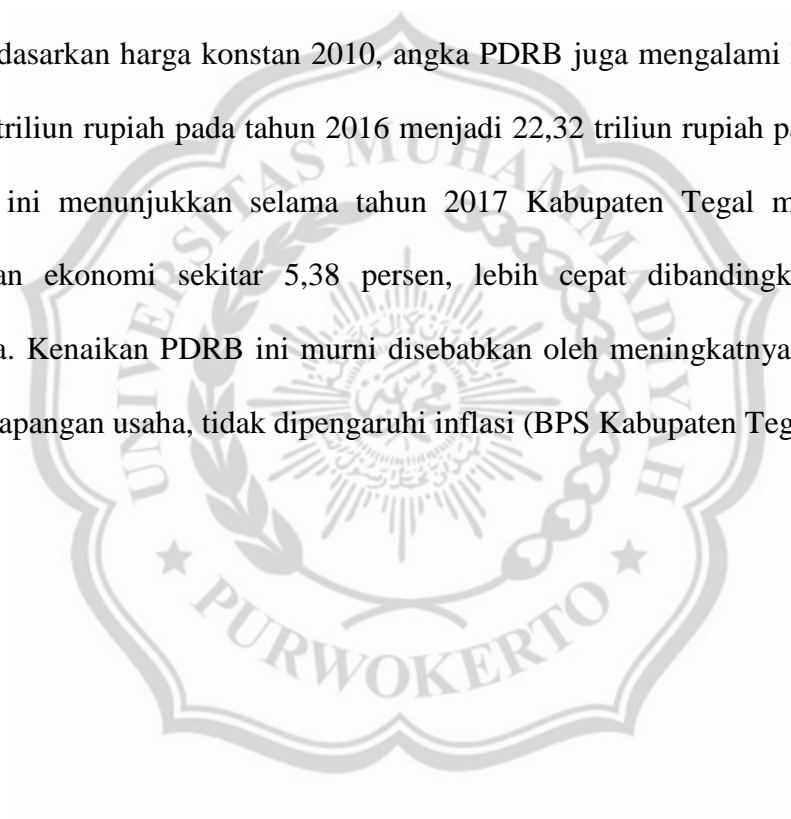
Hal ini didukung oleh pendapat Kuznets (1966) yang membagi peranan sektor pertanian menjadi beberapa bagian dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

(1) kontribusi produk, (2) kontribusi pasar, dan (3) kontribusi faktor. Kenaikan output sektor pertanian akan meningkatkan produk nasional kotor negara yang bersangkutan, karena gross nasional produk merupakan jumlah nilai tambah diberbagai sektor perekonomian, kontribusi ini yang dinamakan dengan kontribusi produk. Sedangkan kontribusi pasar terjadi melalui mekanisme permintaan terhadap produksi faktor-faktor lain dan penawaran produksi pertanian, kontribusi faktor terjadi apabila transfer faktor-faktor produksi sektor pertanian ke sektor non pertanian. Potensi sektor pertanian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional bisa dilihat dari kontribusinya pada berbagai kegiatan perekonomian.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional (Perda No 5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani). Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian salah satunya yaitu Kabupaten Tegal, Hal ini di buktikan dari luas lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebesar 48% atau setengah dari luas wilayah kabupaten. Selain itu, Kabupaten Tegal memiliki jumlah tenaga kerja yang bergerak disektor pertanian sebesar 23% dari total tenaga kerja di Kabupaten Tegal (BPS Kabupaten Tegal 2015).

Kabupaten Tegal menurut (BPS Kabupaten Tegal 2017) memiliki luas wilayah 878,79 km². Nilai PDRB Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2017 mencapai 30,38 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,36 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 28,02 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 21,18 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 22,32 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Kabupaten Tegal mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,38 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi (BPS Kabupaten Tegal 2017).



Tabel 1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tegal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Lapangan usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.70	15.43	15.15	14.62	13.79
2. Pertambangan dan Penggalian	3.83	4.18	4.45	4.47	4.50
3. Industri Pengolahan	31.57	32.72	33.25	34.27	34.91
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
6. Konstruksi	7.50	7.61	7.56	7.39	7.48
7. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.49	15.96	15.62	15.26	15.12
8. Transportasi dan Pergudangan	2.47	2.58	2.65	2.62	2.70
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.06	4.10	4.18	4.27	4.28
10. Informasi dan Komunikasi	2.67	2.60	2.52	2.53	2.60
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.36	2.29	2.31	2.30	2.29
12. Real Estat	1.60	1.60	1.60	1.61	1.60
13. Jasa Perusahaan	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.40	2.31	2.28	2.21	2.19
15. Jasa Pendidikan	4.97	5.12	5.03	5.08	5.18
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.78	0.79	0.78	0.77	0.77
17. Jasa lainnya	2.11	2.21	2.13	2.09	2.07
Produk Domestik Regional Bruto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh 3 (tiga) sektor tertinggi yaitu industri pengolahan (34,91%), perdagangan besar dan eceran (15,12%), pertanian, kehutanan dan perikanan (13,79%). Tingginya presentase industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran diantaranya dipengaruhi oleh pertanian.

Terdapat 5 (Lima) industri besar yang merupakan industri pengolahan berbasis pertanian di Kabupaten Tegal yaitu: teh poci, teh tong tji, teh dua tang, teh gopek dan teh sosro, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.816 orang. Meskipun Industri pengolahan menjadi sektor utama, akan tetapi terdapat sumbangsih sektor pertanian yang penting dalam industri pengolahan terutama dalam penyediaan bahan baku yang berasal dari pertanian. Hal itu menunjukkan kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Tegal cukup tinggi jika dilihat dari hasil pengolahannya (BPS Kabupaten Tegal 2016).

Tabel 2. Angkatan Kerja Kabupaten Tegal Menurut Penyerapan Tenaga Kerja

No.	Tahun	Angkatan Kerja (jiwa)
1.	2011	988.871
2.	2012	1.008.845
3.	2013	1.008.971

Sumber: (BAPPEDA Kabupaten Tegal 2015)

Berdasarkan Tabel 2 Jumlah angkatan kerja Kabupaten Tegal terus mengalami kenaikan, Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja tercatat pada tahun 2011 berjumlah 988.871 orang, tahun 2012 sebanyak 1.008.845 orang, tahun 2013 sebanyak 1.008.971 orang, tahun 2014 terdapat 900.214 orang. Mayoritas penduduk Kabupaten Tegal masih bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012 sebanyak 140.420 orang (7,78%) yang menggeluti lapangan kerja di sektor pertanian, sedangkan jumlah penduduk yang berprofesi di sektor perdagangan pada tahun 2012 sebanyak 160.441 orang (8,89%). Sektor lainnya yang cukup diminati masyarakat adalah sektor industri pengolahan, dan sektor jasa kemasyarakatan yang masing-masing ditekuni oleh 112.244 orang (6,22 %) dan 74.532 orang (4,13 %) (BAPPEDA Kabupaten Tegal 2015).

Berdasarkan seluruh kondisi tersebut, maka diperlukan peran serta pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian agar kontribusi sektor pertanian yang terjadi diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Sebagai konsekuensinya, harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini menggambarkan struktur dan pola perubahan dalam perekonomian, maka diperlukan mengenai analisis penentuan sektor unggulan dan struktur pertanian sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Tegal di masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sektor pertanian masih menjadi unggulan di Kabupaten Tegal?
2. Sub sektor pertanian apa saja yang menjadi unggulan di Kabupaten Tegal?
3. Apakah terjadi perubahan peranan pada sektor pertanian di masa yang akan datang di Kabupaten Tegal?
4. Apakah terjadi perubahan peranan pada Sub sektor pertanian di masa yang akan datang di Kabupaten Tegal?
5. Bagaimana struktur perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis bahas, maka tujuan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peranan sektor pertanian unggulan yang ada di Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui peranan sub sektor pertanian yang menjadi unggulan di Kabupaten Tegal.
3. Mengetahui perubahan peranan yang terjadi pada sektor pertanian di masa yang akan datang di Kabupaten Tegal.
4. Mengetahui perubahan peranan sub sektor pertanian di masa yang akan datang di Kabupaten Tegal.
5. Mengetahui struktur perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi peneliti terkait dengan penentuan keunggulan suatu sektor di setiap daerah serta sebagai sarana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi pemerintah daerah setempat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pertimbangan atau pemikiran dalam menyusun suatu kebijakan dalam meningkatkan potensi serta kontribusi sektor pertanian daerah tersebut.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

E. Pembatasan Masalah dan Asumsi

1. Objek penelitian ini adalah Sektor Pertanian dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal.
2. Nilai rata-rata pertumbuhan dan nilai rata-rata kontribusi sektor pertanian diambil dari PDRB.
3. Analisis yang digunakan bersumber dari BPS Kabupaten dan Provisi menggunakan data PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) 2010 dari tahun 2013 – 2017 menurut lapangan usaha.

